

SALINAN



**WALIKOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI UANG PERSEDIAAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penetapan alokasi uang persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Alokasi Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
16. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dipimpinnya.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disebut PPK Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.

17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
19. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Daerah Kota Batu pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu.
20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
21. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah mekanisme pengisian kembali UP yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai UP kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
22. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah mekanisme penambahan UP guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersifat mendesak dan jumlah batas pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.

## **BAB II**

### **PENETAPAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penetapan pengisian UP Tahun Anggaran 2020 bagi

SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja barang dan jasa dari pendanaan program dan kegiatan untuk setiap bulan pada masing-masing SKPD/Unit Kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Permintaan UP Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan setelah Kepala SKPD/Unit Kerja menyampaikan:
  - a. Laporan Keuangan SKPD/Unit Kerja Tahun Anggaran 2019;
  - b. Laporan SPJ Fungsional Tahun Anggaran 2019;
  - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja; dan
  - d. Surat Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD/Unit Kerja untuk melaksanakan program dan kegiatan SKPD/Unit Kerja.
- (3) Penetapan pengisian UP Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai alokasi besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 3**

- (1) Permintaan Pembayaran UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
- (2) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD/Unit Kerja kepada pihak yang menyediakan barang dan atau jasa serta Belanja Tidak Langsung.

### **Pasal 4**

Mekanisme pembayaran UP melalui proses pengajuan SPP-UP dan SPM-UP, selanjutnya diterbitkan SP2D yang membebani Rekening Kas Umum Daerah Kota Batu untuk ditransfer ke Rekening Bank milik SKPD/Unit Kerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 5**

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan GU, apabila telah merealisasikan UP yang telah diterima minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari UP, dengan melampirkan:

- a. Pengesahan Surat Pertanggungjawaban;
- b. Buku Kas Umum;
- c. Ringkasan Pengeluaran Perincian Objek disertai bukti-bukti pengeluaran dari setiap rincian objek;
- d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh/pajak Daerah; dan
- e. Register Penutupan Kas.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan TU guna melaksanakan kegiatan SKPD/Unit Kerja yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (2) Permintaan TU harus mendapat persetujuan Pejabat PPKD.

### **BAB III**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja secara administratif kepada Kepala SKPD/Unit Kerja melalui PPK SKPD/Unit Kerja paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Untuk pertanggungjawaban TU dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak SP2D TU diterbitkan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### **Pasal 8**

Pada Akhir Tahun Anggaran Sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran baik secara Kas maupun rekening Bank milik SKPD/Unit Kerja harus disetor kembali dan/atau dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Batu.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 13 Januari 2020

**WALIKOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 13 Januari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 4/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH,**

**MUJI DWI LEKSONO, S.H., M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19641010 198503 1 017



**PENETAPAN ALOKASI BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU  
TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>UANG PERSEDIAAN (UP) TA 2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Dinas Pendidikan	163.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	29.438.133,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.475.505,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	92.000.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	72.784.789,00
6	Dinas Perhubungan	80.000.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	555.047.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.196.875,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26.813.733,00
10	Dinas Sosial	19.703.649,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	42.646.991,67
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	31.419.100,00
13	Dinas Pariwisata	30.842.600,00
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	30.100.000,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	40.995.150,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.000.000,00
17	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	8.500.000,00
18	Bagian Hukum	13.000.000,00
19	Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	26.449.258,00
20	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	422.499.995,00
21	Bagian Umum	903.572.300,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
22	Bagian Hubungan Masyarakat	15.138.000,00
23	Bagian Organisasi	14.844.546,67
24	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial	9.572.000,00
25	Bagian Layanan Pengadaan	35.542.467,00
26	Sekretariat DPRD	1.846.607.000,00
27	Badan Keuangan Daerah	40.593.764,00
28	Inspektorat	84.799.233,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.000.000,00
30	Kecamatan Batu	36.560.473,00
31	Kecamatan Bumiaji	22.301.733,08
32	Kecamatan Junrejo	18.992.900,00
33	Dinas Ketahanan Pangan	35.000.000,00
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.693.558,00
35	Dinas Penanggulangan Kebakaran	66.949.267,00
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	57.400.000,00
37	Dinas Pertanian	93.639.567,00
38	Kelurahan Ngaglik	19.099.213,00
39	Kelurahan Dadaprejo	13.324.817,00
40	Kelurahan Sisir	28.680.000,00
41	Kelurahan Temas	10.360.000,00
42	Kelurahan Songgokerto	18.821.280,00
<b>T O T A L</b>		<b>5.381.404.897,42</b>

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

